

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

A. Perkembangan Inflasi Daerah

1. Inflasi Triwulan II

Perkembangan inflasi di Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang relatif terkendali dengan kecenderungan tekanan harga yang lebih rendah dibandingkan akhir Triwulan I. Setelah tekanan inflasi meningkat selama periode Ramadan dan Idulfitri pada Maret 2026, inflasi mulai melandai pada April sebelum kembali mengalami peningkatan terbatas pada Mei. Kondisi tersebut mencerminkan mulai normalnya aktivitas ekonomi dan distribusi barang pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), meskipun beberapa komoditas pada kelompok transportasi dan administered prices masih memberikan tekanan terhadap inflasi.

Berikut perkembangan laju inflasi selama triwulan II 2026 :

Laju Inflasi (%)	April	Mei	Juni
Bulanan (mtm)	0,11	0,17	0,70
Tahun Kalender (ytd)	1,48	1,65	2,36
Tahunan (yoy)	2,50	3,04	3,20

Secara tahunan (yoy), inflasi Kalimantan Timur pada April 2026 tercatat sebesar **2,50%**, kemudian meningkat menjadi **3,04%** pada Mei 2026 dan **3,20%** pada Juni 2026. Hingga akhir Juni 2026, inflasi Provinsi Kalimantan Timur masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional ($2,5 \pm 1\%$), yang menunjukkan stabilitas harga secara umum masih terjaga.

Sementara itu, secara kumulatif (ytd), inflasi hingga akhir Juni 2026 tercatat sebesar **2,36%** yang menunjukkan bahwa tekanan harga secara agregat masih dalam batas yang dapat dikendalikan

Lebih lanjut, secara spasial, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan inflasi pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan adanya variasi antar kabupaten/kota yang mencerminkan perbedaan karakteristik ekonomi, struktur konsumsi, serta kondisi distribusi di masing-masing wilayah.

Pada April 2026, inflasi tahunan (yoy) tertinggi terjadi di **Kota Samarinda** sebesar **2,92%** dengan IHK sebesar **111,50**, sedangkan inflasi terendah terjadi di **Kabupaten Penajam Paser Utara** sebesar **2,10%** dengan IHK sebesar **111,66**. Secara bulanan (mtm), tekanan harga relatif merata di seluruh kabupaten/kota IHK dengan peningkatan yang terutama dipengaruhi oleh kelompok transportasi, seiring masih tingginya mobilitas masyarakat pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri serta penyesuaian harga pada komoditas administered prices. Di sisi lain, membaiknya pasokan pangan mampu menahan tekanan inflasi di sebagian besar wilayah.

Memasuki Mei 2026, variasi inflasi antarwilayah masih terlihat. **Kota Samarinda** kembali mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar **3,42%** dengan IHK sebesar **111,62**, sedangkan inflasi terendah tercatat di **Kabupaten Penajam Paser Utara** sebesar **2,33%** dengan IHK sebesar **111,59**. Peningkatan tekanan inflasi pada Mei terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok transportasi, khususnya angkutan udara dan bahan bakar nonsubsidi,

yang memberikan dampak lebih besar pada wilayah dengan tingkat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang relatif tinggi. Sementara itu, daerah dengan ketergantungan lebih besar terhadap komoditas pangan lokal memperoleh manfaat dari membaiknya pasokan sehingga tekanan inflasi dari kelompok volatile foods cenderung lebih rendah.

Pada Juni 2026, inflasi tahunan (yoy) tertinggi terjadi di **Kota Samarinda** sebesar **3,53%** sedangkan inflasi terendah terjadi di **Kabupaten Penajam Paser Utara** sebesar **2,96%**. Secara bulanan (mtm), tekanan harga relatif merata di seluruh kabupaten/kota IHK dengan peningkatan yang terutama dipengaruhi oleh kelompok transportasi.

Secara umum, perkembangan inflasi spasial pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa dinamika inflasi di Provinsi Kalimantan Timur masih dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik ekonomi masing-masing daerah, terutama terkait jumlah penduduk, intensitas aktivitas perdagangan dan jasa, pola konsumsi masyarakat, serta kelancaran distribusi barang. Oleh karena itu, pelaksanaan pengendalian inflasi melalui strategi 4K perlu terus disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing kabupaten/kota, khususnya dalam menjaga kelancaran distribusi, memperkuat pasokan pangan strategis, serta mengantisipasi tekanan harga pada komponen administered prices.

2. Perkembangan Inflasi Bulan April 2026

Pada April 2026, Provinsi Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar **0,11% (mtm)**, **1,48% (ytd)**, dan **2,50% (yoy)**. Secara bulanan, tekanan inflasi menurun dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 0,72% (mtm), mencerminkan mulai meredanya tekanan harga pasca Hari Besar Keagamaan Nasional Idulfitri.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi April 2026 terutama disumbangkan oleh kelompok transportasi seiring kenaikan biaya pemeliharaan kendaraan, tarif angkutan udara, solar, pelumas, dan bensin. Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turut memberikan andil inflasi yang dipengaruhi penyesuaian harga bahan bakar rumah tangga.

Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh deflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau seiring membaiknya pasokan pangan setelah HBKN serta normalisasi permintaan masyarakat. Deflasi juga terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya akibat penurunan harga beberapa komoditas pada kelompok tersebut.

Berdasarkan komoditasnya, tekanan inflasi Provinsi Kaltim periode April 2026 tertuang dalam tabel berikut :

Komoditas Inflasi		Komoditas Inflasi	
pemeliharaan/service		emas perhiasan	
lemari pakaian		angkutan Udara	
solar		beras	
angkutan udara		sigaret kretek mesin (SKM)	
Komoditas Andil mtm	pelumas/oli mesin	Komoditas Andil yoy	ikan layang/ikan benggol
	Komoditas Deflasi		Komoditas Deflasi
	daging ayam ras		tas sekolah
	cabai rawit		makanan hewan pemeliharaan
	emas perhiasan		
	ikan layang/ikan benggol		
	kacang panjang		

3. Perkembangan Inflasi Bulan Mei 2026

Pada Mei 2026, Provinsi Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar **0,17% (mtm)**, **1,65% (ytd)**, dan **3,04% (yoy)**. Secara bulanan, tekanan inflasi meningkat dibandingkan April 2026 yang sebesar 0,11% (mtm).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi Mei 2026 terutama disumbangkan oleh kelompok transportasi seiring meningkatnya harga angkutan udara, solar, dan bensin sebagai dampak penyesuaian harga BBM nonsubsidi serta avtur. Selain itu, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran turut memberikan andil inflasi seiring masih tingginya aktivitas konsumsi masyarakat.

Sementara itu, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada komponen volatile foods sebesar -1,09% (mtm), mencerminkan membaiknya pasokan dan koreksi harga sejumlah komoditas pangan strategis. Deflasi terutama terjadi pada komoditas daging ayam ras, kangkung, ikan tongkol, ikan layang, dan bawang merah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan inflasi Mei 2026 lebih banyak dipengaruhi oleh komponen inti (core inflation) dan administered prices, sedangkan tekanan harga pangan relatif terkendali.

Berdasarkan komoditasnya, tekanan inflasi Provinsi Kaltim periode Mei 2026 tertuang dalam tabel berikut :

Komoditas Inflasi		Komoditas Inflasi	
Komoditas Andil mtm	Angkutan udara	Komoditas Andil yoy	Emas perhiasan
	Solar		Angkutan udara
	Sewa rumah		Beras
	Pelumas/Oli mesin		Sigaret kretek mesin
	Sate		Ikan layang/ikan benggol
Komoditas Deflasi		Komoditas Deflasi	
	Daging ayam ras		Tas sekolah
	Emas perhiasan		Baju muslim pria
	Ikan layang/ikan benggol		Baju muslim wanita.
	Bawang merah		

4. Perkembangan Inflasi Bulan Juni 2026

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kalimantan Timur pada Juni 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,70% (mtm), dengan inflasi tahunan dan tahun kalender masing-masing sebesar 3,20% (yoy) dan 2,36% (ytd). Secara tahunan, inflasi Kaltim tercatat lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 3,34% (yoy) namun mengalami peningkatan tekanan harga dibandingkan Mei.

Berdasarkan komoditasnya, tekanan inflasi Provinsi Kaltim periode Juni 2026 tertuang dalam tabel berikut :

	Komoditas Inflasi
	Bensin
	Angkutan Udara
	Bawang Merah
	Beras
Komoditas Andil mtm	Ikan Layang/Ikan Benggol
	Komoditas Deflasi
	Daging Ayam Ras
	Cabai Rawit
	Semangka
	Tomat
	Kacang Panjang

	Komoditas Inflasi
	Emas perhiasan
	Bensin
	Angkutan udara
	Sigaret kretek mesin
Komoditas Andil yoy	Beras
	Komoditas Deflasi
	Tas sekolah

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi Juni 2026 terutama disumbangkan oleh kelompok transportasi dengan andil 0,55%, didorong oleh kenaikan harga BBM Nonsubsidi Pertamina dan Pertamina turbo serta harga avtur. Selain itu kelompok makanan, minuman, dan tembakau turut memberikan andil inflasi akibat cuaca buruk di daerah pemasok yang berpengaruh pada harga bawang merah, beras dan ikan layang . Sementara itu, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan kelompok rekreasi.

5. Perbandingan Perkembangan Inflasi Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026

Secara umum, perkembangan inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang lebih stabil dibandingkan Triwulan I. Pada Triwulan I, tekanan inflasi relatif tinggi seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri, penyesuaian tarif listrik, kenaikan harga emas perhiasan, serta meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan strategis seperti cabai rawit, beras, dan daging ayam ras. Inflasi tahunan bahkan mencapai puncaknya pada Februari 2026 sebesar **4,64% (yoy)** sebelum menurun menjadi **3,31% (yoy)** pada Maret.

Memasuki Triwulan II, tekanan inflasi mulai mengalami normalisasi. Inflasi tahunan tercatat sebesar **2,50% (yoy)** pada April dan meningkat terbatas menjadi **3,04% (yoy)** pada Mei dan 3,20% (yoy) pada Juni, sedangkan inflasi bulanan tetap berada pada level rendah yaitu **0,11%, 0,17% dan 0,70%**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga yang bersumber dari kelompok volatile foods mulai mereda seiring membaiknya pasokan namun biaya distribusi pangan cukup dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM.

Perubahan sumber tekanan inflasi juga terlihat cukup jelas. Pada Triwulan I, inflasi lebih banyak dipicu oleh tingginya permintaan musiman dan kenaikan harga komoditas pangan. Sebaliknya pada Triwulan II, tekanan inflasi bergeser ke kelompok *administered prices* dan *core inflation*, terutama berasal dari kenaikan tarif angkutan udara, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan biaya pemeliharaan kendaraan. Di sisi lain, kelompok pangan bergejolak (*volatile foods*) justru mengalami koreksi harga pada beberapa komoditas utama seperti daging ayam ras, cabai rawit, kangkung, tomat dan kacang panjang sehingga mampu menahan tekanan inflasi yang lebih tinggi.

Secara spasial, pola inflasi antarwilayah juga relatif konsisten. Kota Samarinda masih mencatat inflasi tertinggi pada April, Mei maupun Juni, sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat inflasi terendah. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan dengan aktivitas perdagangan, jasa, dan transportasi yang lebih tinggi cenderung lebih sensitif terhadap perubahan administered prices dibandingkan wilayah lainnya.

B. Risiko Inflasi Triwulan III 2026

Memasuki triwulan III tahun 2026, perekonomian Kalimantan Timur dihadapkan pada sejumlah tantangan dan risiko inflasi yang perlu diwaspadai.

Faktor-Faktor Risiko Utama Inflasi Triwulan III 2026 :

1. Risiko Musim Kemarau terhadap Produksi dan Pasokan Pangan

Prakiraan BMKG menunjukkan sebagian wilayah Kalimantan Timur mulai memasuki musim kemarau pada periode Juni-Agustus 2026 dengan kecenderungan kondisi yang lebih kering dibandingkan normal. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, mengurangi ketersediaan air irigasi, serta meningkatkan risiko gagal panen pada sentra produksi lokal.

Penurunan produksi lokal berpotensi meningkatkan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sehingga memperbesar risiko kenaikan harga apabila terjadi gangguan distribusi.

2. Tingginya Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah

Struktur perekonomian Kalimantan Timur masih sangat bergantung pada pasokan bahan pangan dari Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah sentra produksi lainnya. Apabila terjadi gangguan cuaca, keterlambatan pelayaran, kenaikan ongkos angkut, maupun hambatan distribusi darat, maka harga komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan minyak goreng berpotensi mengalami peningkatan.

Risiko ini relatif lebih tinggi pada kabupaten/kota dengan akses logistik terbatas, seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Berau, dan wilayah pedalaman lainnya yang memerlukan waktu distribusi lebih panjang.

3. Peningkatan Permintaan Akibat Tahun Ajaran Baru dan Aktivitas Ekonomi

Periode Juli 2026 yang bertepatan dengan awal tahun ajaran baru diperkirakan meningkatkan permintaan terhadap kelompok pendidikan, pakaian, alas kaki, perlengkapan sekolah, jasa transportasi, serta konsumsi rumah tangga.

Di sisi lain, berlanjutnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diperkirakan meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi di wilayah Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan permintaan terhadap komoditas pangan, jasa transportasi, serta sewa rumah sehingga memberikan tekanan pada komponen inflasi inti (*core inflation*).

4. Risiko Kenaikan Harga Energi dan Biaya Logistik

Perkembangan harga minyak dunia masih menjadi salah satu faktor eksternal yang perlu diwaspadai. Potensi penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan avtur dapat meningkatkan biaya transportasi darat maupun udara yang pada akhirnya berdampak terhadap kenaikan biaya distribusi barang dan jasa di Kalimantan Timur.

Mengingat karakteristik wilayah yang bergantung pada transportasi laut dan udara untuk

distribusi barang, kenaikan biaya logistik berpotensi memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan provinsi lain.

5. Risiko Perbedaan Tekanan Inflasi Antarwilayah

Perbedaan karakteristik ekonomi antar kabupaten/kota menyebabkan tekanan inflasi tidak merata. Wilayah perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan cenderung lebih sensitif terhadap kenaikan harga jasa, transportasi, dan biaya hunian, sedangkan wilayah pedalaman lebih rentan terhadap gangguan pasokan dan distribusi pangan.

Oleh karena itu, strategi pengendalian inflasi perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah melalui penguatan kerja sama antar daerah, peningkatan kelancaran distribusi, serta optimalisasi pemantauan harga secara real time.

6. Peningkatan permintaan masyarakat (demand side pressure)

Kenaikan harga energi, meningkatnya biaya transportasi, maupun informasi mengenai potensi gangguan pasokan dapat memengaruhi ekspektasi inflasi masyarakat. Apabila tidak diimbangi dengan komunikasi publik yang efektif, kondisi tersebut berpotensi mendorong perilaku pembelian berlebihan (*panic buying*) yang dapat memperbesar tekanan harga di tingkat konsumen.

7. Keterbatasan ruang fiskal daerah

Efisiensi anggaran dapat membatasi kapasitas intervensi pemerintah daerah, namun dampaknya tidak langsung terhadap inflasi, melainkan pada efektivitas pengendalian.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan II Tahun 2026 masih menghadapi sejumlah permasalahan, baik yang bersifat struktural maupun teknis operasional. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dinamika harga, tetapi juga mencerminkan keterbatasan sistem produksi, distribusi, serta kapasitas intervensi kebijakan di daerah.

1. Tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

Sebagian besar komoditas pangan strategis, seperti beras, cabai, bawang, dan daging ayam, masih dipasok dari provinsi lain. Kondisi ini menyebabkan stabilitas harga di Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi dan distribusi di daerah pemasok. Ketika terjadi gangguan pasokan, baik akibat cuaca maupun distribusi, dampaknya langsung dirasakan dalam bentuk kenaikan harga di daerah.

2. Keterbatasan infrastruktur dan tingginya biaya distribusi.

Kondisi geografis Kalimantan Timur yang luas serta belum meratanya infrastruktur transportasi menyebabkan proses distribusi barang menjadi kurang efisien. Hal ini mengakibatkan tingginya biaya logistik yang pada akhirnya meningkatkan harga barang di

tingkat konsumen. Selain itu, gangguan distribusi akibat cuaca atau kondisi jalan juga dapat memperburuk ketidakstabilan harga.

3. Volatilitas harga komoditas pangan strategis

Komoditas seperti cabai, bawang merah, dan daging ayam ras memiliki karakteristik harga yang sangat fluktuatif. Perubahan kecil pada sisi pasokan maupun permintaan dapat menyebabkan lonjakan harga yang signifikan, sehingga menyulitkan upaya stabilisasi harga dalam jangka pendek.

4. Tingginya kontribusi komponen energi terhadap inflasi daerah

Kenaikan harga energi, khususnya tarif listrik dan potensi penyesuaian harga BBM, memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap inflasi. Dampak tidak langsung tersebut terjadi melalui peningkatan biaya distribusi dan produksi, yang kemudian mendorong kenaikan harga barang dan jasa lainnya.

5. Keterbatasan ruang fiskal daerah dalam melakukan intervensi pengendalian inflasi

Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan alokasi untuk kegiatan pengendalian inflasi menjadi lebih terbatas, sehingga intervensi yang dilakukan, seperti operasi pasar atau subsidi distribusi, belum dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, permasalahan pengendalian inflasi di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada pengendalian harga di hilir, tetapi juga pada penguatan sisi hulu (produksi), distribusi, serta efektivitas kebijakan intervensi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis pada identifikasi permasalahan secara menyeluruh.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan **Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K)** selama Triwulan II Tahun 2026 secara umum menunjukkan hasil yang cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga di Provinsi Kalimantan Timur.

1. Keterjangkauan Harga

Pelaksanaan operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga harian, serta koordinasi pengendalian harga selama dan setelah HBKN mampu menjaga kenaikan harga komoditas strategis agar tidak berlangsung berkepanjangan. Hal tersebut tercermin dari menurunnya tekanan inflasi bulanan setelah Maret serta terkendalinya inflasi pada kelompok volatile foods selama April dan Mei.

2. Ketersediaan Pasokan

Koordinasi bersama Bulog, distributor, BUMD pangan, pemerintah kabupaten/kota, serta pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) turut menjaga kecukupan pasokan beras, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, dan komoditas hortikultura. Membaiknya pasokan

tercermin dari terjadinya deflasi pada beberapa komoditas pangan utama selama Triwulan II.

3. Kelancaran Distribusi

Kelancaran distribusi relatif terjaga meskipun masih terdapat tantangan pada wilayah dengan akses logistik yang terbatas. Pemantauan distribusi pangan strategis, koordinasi dengan instansi teknis, serta pengawasan distribusi BBM dan LPG turut menjaga kelancaran rantai pasok sehingga tidak terjadi gangguan pasokan yang signifikan.

4. Komunikasi Efektif

Pelaksanaan High Level Meeting TPID, rapat koordinasi mingguan pengendalian inflasi, publikasi perkembangan harga, serta edukasi kepada masyarakat mengenai belanja bijak dan diversifikasi pangan mampu memperkuat ekspektasi inflasi masyarakat sehingga tidak terjadi panic buying maupun lonjakan permintaan yang berlebihan.

Secara keseluruhan, strategi 4K TPID selama Triwulan II dinilai cukup efektif dalam menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran nasional. Namun demikian, tekanan dari *administered prices*, biaya transportasi, dan harga energi masih menjadi tantangan yang memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan II Tahun 2026 secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik dalam menjaga stabilitas harga, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah keterbatasan. Hal ini tercermin dari inflasi yang masih berada dalam rentang terkendali, meskipun mengalami peningkatan pada Mei dan Juni. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang dilakukan mampu meredam tekanan inflasi, namun belum sepenuhnya mampu mengimbangi tekanan inflasi dari kelompok *administered prices* dan *core inflation*.
- Dari sisi **keterjangkauan harga**, pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) terbukti cukup efektif dalam menahan lonjakan harga komoditas pangan strategis dalam jangka pendek, terutama pada periode meningkatnya permintaan. Namun demikian, intervensi ini masih bersifat sementara dan belum mampu memberikan dampak stabilisasi harga secara berkelanjutan, terutama pada komoditas yang memiliki volatilitas tinggi seperti cabai dan bawang merah.
- Pada aspek **ketersediaan pasokan**, upaya penguatan kerjasama antar daerah dan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah telah membantu menjaga ketersediaan barang di pasar. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas oleh tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengendalikan harga ketika terjadi gangguan pada daerah pemasok, sehingga risiko inflasi masih cukup tinggi.
- Dalam aspek **kelancaran distribusi**, pemantauan distribusi dan pelaksanaan sidak pasar telah berjalan dengan baik dalam mengidentifikasi potensi hambatan di lapangan. Meskipun demikian, permasalahan struktural seperti tingginya biaya logistik dan keterbatasan infrastruktur distribusi masih menjadi kendala utama yang belum dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Dampaknya, disparitas harga antar wilayah masih terjadi dan menjadi salah satu faktor penyumbang inflasi.
- Sementara itu, pada aspek **komunikasi efektif**, pemerintah daerah telah secara aktif

menyampaikan informasi harga dan melakukan koordinasi melalui berbagai forum. Upaya ini cukup membantu dalam menjaga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan perkembangan inflasi selama Triwulan II Tahun 2026, beberapa langkah strategis yang perlu menjadi perhatian TPID Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. Memperkuat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, dan pemanfaatan kios penyeimbang menjelang Tahun Ajaran Baru dan HBKN berikutnya.
2. Memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas hortikultura utama seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan tomat guna mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah tertentu.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem Early Warning System (EWS) dan aplikasi **MANDAU KALTIM** sebagai instrumen pemantauan harga, stok, distribusi, dan rekomendasi kebijakan secara real time.
4. Memperkuat koordinasi dengan Bulog, BUMD pangan, distributor, Pertamina, Hiswana Migas, dan instansi teknis dalam menjaga stabilitas pasokan pangan serta distribusi BBM dan LPG.
5. Mengintensifkan pemantauan harga dan distribusi pada daerah dengan tingkat inflasi relatif tinggi, khususnya wilayah perkotaan yang lebih sensitif terhadap perubahan administered prices.
6. Mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui penguatan kawasan hortikultura, pengembangan urban farming, serta peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah sebagai langkah mitigasi terhadap risiko gangguan pasokan.
7. Memperkuat strategi komunikasi publik melalui publikasi perkembangan harga, edukasi pola konsumsi yang bijak, serta penyampaian informasi yang cepat dan akurat untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.